EVALUASI TATA CARA PELAPORAN USAHA KENA PAJAK MELALUI APLIKASI *E-REGISTRATION*

Agus Bandiyono dan Lila Chika Aslamia Ahmad

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

Abstract: Evaluation Procedure Taxable Business Reporting Through e-Registration Application.

This study aims to clarify reporting procedures and strengthening PFM business through the application of e-Registration in accordance with applicable regulations and reporting procedures to evaluate whether the business and strengthening PFM through the application of e-Registration on STO Jakarta Cakung One. This research method using literature study and field studies were conducted to obtain data describing actual field conditions. The results of this study indicate that business reporting procedures and strengthening PFM through the application of e-Registration happens on STO Jakarta Cakung One is not in accordance with the procedures for business reporting and confirmation PKP via e-Registration applications described in the SOP. Incompatibility description in the script SOP can cause work procedures implemented in each KPP is different because there is no SOP in accordance with existing regulations on procedures for business reporting and strengthening PFM through the application of e-Registration.

Abstrak: Evaluasi Tata Cara Pelaporan Usaha Kena Pajak Melalui Aplikasi *e-Registration*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengevaluasi apakah tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu belum sesuai dengan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang diuraikan dalam SOP. Ketidaksesuaian uraian dalam naskah SOP dapat menyebabkan prosedur kerja yang dilaksanakan di tiap-tiap KPP berbeda karena belum ada SOP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration*.

Kata Kunci: administrasi bisnis, manajemen publik, sistem informasi, e-registration

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang disebut sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 memperkenalkan istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pasal 1 angka 14 UU PPN 1984 mendefinisikan PKP sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang tersebut. PKP adalah status yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Status PKP ini merupakan identitas Wajib Pajak untuk memudahkan ketika melaksanakan kewajiban perpajakan dan menerima haknya. Namun, tidak semua pengusaha diwajibkan melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan Pasal 3A ayat (1a) UU PPN 1984 yang menyatakan bahwa pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kata dapat mempunyai arti bahwa pengusaha kecil tersebut diberikan hak atau kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak.

DJP meluncurkan inovasi baru berupa aplikasi berbasis sambung jaringan (*online*) yang memudahkan Wajib Pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Aplikasi ini disebut *e-Registration* atau biasa disingkat *e-Reg*. Selain sebagai sarana pelaporan usaha, aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh pegawai DJP, misalnya pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung Satu, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem *e-Registration* ditetapkan, pegawai KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, terutama pegawai Seksi Pelayanan, menggunakan aplikasi *e-Registration* untuk melayani permohonan Wajib Pajak. Aplikasi ini menyederhanakan prosedur operasional penyelesaian permohonan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu karena mengurangi jumlah antrean yang ada di kantor tersebut. Selain itu, proses penyampaian dokumen yang disyaratkan menjadi lebih mudah karena dokumen tersebut dapat diunggah melalui aplikasi *e-Registration*.

Mekanisme permohonan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* berbeda dengan mekanisme permohonan secara manual melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui aplikasi *e-Registration*, formulir pengukuhan PKP dan dokumen yang disyaratkan tidak secara langsung ada di TPT. Oleh karena itu, mekanisme permohonan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* ini harus diatur sendiri dan tidak bisa disamakan dengan mekanisme permohonan pengukuhan PKP secara manual. Hal ini berdampak pada kebutuhan peraturan pelaksanaan seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kerja Pajak, Serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2013. Surat edaran ini mengubah istilah *permohonan pengukuhan PKP secara elektronik melalui aplikasi e-Registration* menjadi *tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi e-Registration*.

Tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP). SOP ini yang dijadikan acuan oleh pegawai KPP Pratama Jakarta Cakung Satu untuk menyelesaikan permohonan Wajib Pajak. Sesuai dengan namanya, SOP menguraikan standar pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPP kepada Wajib Pajak. Jadi, pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu minimal harus sesuai dengan prosedur kerja yang diuraikan dalam naskah SOP.

Uraian tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* dalam naskah SOP memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak sehingga SOP yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu akan dibandingkan dengan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang diuraikan dalam naskah SOP yang berkaitan dengan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration*. Selain itu, tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu akan dibandingkan dengan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengertian pengusaha sebenarnya cukup luas karena istilah pengusaha dalam UU PPN 1984 secara otomatis dianggap sebagai PKP jika melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UU PPN 1984. Bahkan, Mardiasmo (2011: 145) menjabarkan siapa saja yang termasuk PKP, yaitu pabrikan/produsen, importir, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir, agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir, pedagang besar, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, dan pedagang eceran. Oleh karena itu, pasal 3A ayat (1a) UU PPN 1984 mempersempit

definisi tersebut dengan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan batasan omset bagi pengusaha yang tidak wajib melaporkan usahanya yang disebut sebagai pengusaha kecil.

Pengusaha kecil didefinisikan sebagai pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Meskipun tidak wajib melaporkan usahanya, pengusaha kecil tetap mempunyai hak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pernyataan ini didukung dengan adanya ketentuan pasal 3A ayat (1a) UU PPN 1984 yang berbunyi pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dapat* memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi pengukuhan PKP sebagaimana dijelaskan dalam memori penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya; untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Aplikasi *e-Registration* atau sistem pendaftaran Wajib Pajak sambung jaringan (*online*) adalah sistem aplikasi yang merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP. Aplikasi ini dapat dijumpai di laman DJP, yaitu www.pajak.go.id. Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kerja Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib

Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2013 mendefinisikan aplikasi *e-Registration* sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem yang berbasis perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) ini dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

Dasar hukum yang mengatur tentang SOP di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan. SOP pada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dikoordinasikan dan/atau disusun oleh masing-masing unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi bidang organisasi dan tata laksana dan/atau transformasi proses bisnis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengevaluasi apakah tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang diuraikan dalam SOP sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.

METODE

Metode penulisan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat mendukung penulisan ini adalah metode studi literatur. Metode

ini dilaksanakan dengan cara mempelajari sejumlah literatur untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas. Literatur yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, buku, artikel, dan laman DJP yang relevan dengan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration*. Selain itu digunakan metode studi lapangan yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan meminta data yang dibutuhkan kepada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu untuk mengevaluasi tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration*, misalnya SOP. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang terkait langsung dengan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemantauan Aplikasi *e-Registration*

Sistem aplikasi *e-Registration* yang digunakan oleh pegawai KPP Pratama Jakarta Cakung Satu memiliki menu pemantauan yang menunjukkan jumlah permohonan yang masuk melalui aplikasi tersebut. Jumlah permohonan ini adalah gabungan dari permohonan yang diajukan secara manual, permohonan melalui internet, dan permohonan yang diajukan melalui kegiatan ekstensifikasi. Permohonan ini meliputi permohonan pendaftaran NPWP, permohonan pengukuhan PKP, permohonan pencabutan PKP, permohonan penghapusan NPWP, permohonan perubahan data, permohonan penetapan nonefektif (NE), permohonan pengaktifan NE, permohonan pemindahan Wajib Pajak, permohonan cetak ulang NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan permohonan cetak NPWP istri.

Jumlah permohonan yang terekam periode 1 Januari 2016 sampai dengan 16 Juni 2016 pukul 03.00 WIB adalah 129.782. Data pemantauan ini disajikan dalam Grafik II.1. Rincian permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

a. permohonan pendaftaran NPWP sebanyak 90.313 atau 70% total permohonan,

- b. permohonan pengukuhan PKP sebanyak 1.096 atau 1% dari total permohonan,
- c. permohonan pencabutan PKP sebanyak 231 atau 0% dari total permohonan,
- d. permohonan penghapusan NPWP sebanyak 404 atau 0% dari total permohonan,
- e. permohonan perubahan data sebanyak 6.099 atau 5% dari total permohonan,
- f. permohonan penetapan nonefektif (NE) sebanyak 242 atau 0% total permohonan,
- g. permohonan pengaktifan NE sebanyak 10.054 atau 8% dari total permohonan,
- h. permohonan pemindahan Wajib Pajak (WP) sebanyak 1.593 atau 1% dari total permohonan,
- i. permohonan cetak ulang NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebanyak 19.277 atau 15% dari total permohonan, dan
- j. permohonan cetak NPWP istri sebanyak 220 atau 0% dari total permohonan.

Atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, KPP Pratama Jakarta Cakung Satu menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) apabila permohonan dan dokumen yang disyaratkan memenuhi syarat formal dan material. Penerbitan BPS ini merupakan tindak lanjut permohonan pendaftaran yang terekam dalam aplikasi *e-Registration*. Rincian jumlah permohonan penerbitan BPS selama periode 1 Januari-16 Juni 2016 untuk tiap-tiap jenis permohonan yang dirangkum dalam tabel II.1 adalah sebagai berikut:

- a. permohonan dengan status proses penerbitan BPS berjumlah 8 dan permohonan dengan status selesai berjumlah 319 untuk permohonan pendaftaran WP OP,
- b. permohonan dengan status selesai ada 1 untuk pendaftaran WP Badan,
- c. permohonan ada 0 untuk pendaftaran WP Bendahara,
- d. permohonan dengan status selesai berjumlah 10 untuk permohonan pengukuhan PKP,
- e. permohonan dengan status proses perekaman BPS berjumlah 17 dan permohonan dengan status selesai berjumlah 3 untuk permohonan penghapusan WP,
- f. permohonan ada 0 untuk permohonan pencabutan pengukuhan PKP,
- g. permohonan dengan status proses penerbitan

BPS berjumlah 3 dan permohonan dengan status selesai berjumlah 15 untuk permohonan perubahan data,

- h. permohonan dengan status proses perekaman BPS berjumlah 2 dan permohonan dengan status selesai berjumlah 2 untuk permohonan penetapan Wajib Pajak Nonefektif (WP NE),
- i. permohonan dengan status proses penerbitan BPS berjumlah 1 dan permohonan dengan status selesai berjumlah 10 untuk permohonan pengaktifan WP NE,
- j. permohonan dengan status selesai berjumlah 101 untuk permohonan cetak ulang,
- k. permohonan dengan status selesai berjumlah 7 untuk permohonan pemindahan Wajib Pajak (WP), dan
- l. permohonan dengan status dalam proses penerbitan BPS berjumlah 8 dan permohonan dengan status selesai berjumlah 319 untuk permohonan cetak NPWP istri.

Permohonan pengukuhan PKP yang diajukan oleh Wajib Pajak ditindaklanjuti oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu berdasarkan hasil Verifikasi. Tindak lanjut ini dapat berupa penerimaan atau penolakan pengukuhan PKP. Peman-tauan permohonan pengukuhan PKP di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu periode 1 Januari-16 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

- a. permohonan dengan status terima berjumlah 4 dan status tolak berjumlah 1 pada bulan Januari;
- b. permohonan dengan status terima berjumlah 5 dan status tolak berjumlah 1 pada bulan Februari;
- c. permohonan dengan status terima berjumlah 2 dan status tolak berjumlah 3 pada bulan Maret;
- d. permohonan dengan status terima berjumlah 8 dan status tolak berjumlah 1 pada bulan April;
- e. permohonan dengan status terima berjumlah 4 dan status tolak berjumlah 3 pada bulan Mei;
- f. permohonan dengan status terima berjumlah 1 dan status tolak berjumlah 1 pada bulan Juni.

Tata Cara Pelaporan Usaha Kena Pajak Melalui Aplikasi *e-Registration*

Tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* diatur secara rinci dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013, yaitu sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>. Wajib Pajak memilih menu aplikasi *e-Registration* dan *login* pada aplikasi *e-Registration*.
- b. Wajib Pajak masuk ke menu *pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP*, mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui aplikasi *e-Registration*.
- c. Wajib Pajak mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP. Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara sambung jaringan (*online*) melalui aplikasi *e-Registration*, Wajib Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui sistem yang tersedia pada aplikasi *e-Registration*. Apabila dokumen yang disyaratkan tidak dikirim secara sambung jaringan (*online*) melalui aplikasi *e-Registration*, Wajib Pajak mencetak Surat Pengiriman Dokumen (SPD) untuk kemudian mengirimkan SPD dan dokumen yang disyaratkan ke KPP. Jangka waktu pengiriman dokumen yang disyaratkan adalah empat belas hari kerja setelah penyampaian permohonan pengukuhan secara elektronik. Apabila jangka waktu tersebut sudah terlewati, permohonan dianggap tidak diajukan.

KPP yang dimaksud dalam tata cara ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK. 03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pasal 3 ayat (3) PMK ini mengatur bahwa KPP tempat pelaporan usaha Wajib Pajak dan tempat untuk mengirimkan dokumen yang disyaratkan adalah KPP atau Kantor Pe-

layanannya, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau KPP tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kata *atau* dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa kedua jenis KPP atau tempat pelaporan usaha tersebut merupakan pilihan. Ini artinya, pengusaha tidak boleh melaporkan usahanya di kedua jenis tempat pelaporan usaha tersebut. Wahyudi (2012: <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-pertambahan-nilai/pengukuhan-pengusaha-kena-pajak-pkp.html>) menjelaskan bahwa tempat pelaporan usaha di KPP tertentu ini dikhususkan bagi pengusaha atau Wajib Pajak tertentu yang pengadministrasiannya tidak berdasarkan wilayah kerja, tetapi berdasarkan jenis Wajib Pajaknya atau ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Petugas pendaftaran memantau informasi pendaftaran Wajib Pajak pada sistem *e-Registration* setiap hari kerja. Bagian materi dan penjelasan huruf q mendefinisikan petugas pendaftaran sebagai pegawai Seksi Pelayanan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk melaksanakan seluruh prosedur kerja pengukuhan PKP.

d. Petugas pendaftaran menerima SPD dan dokumen yang disyaratkan, meneliti kelengkapan, memproses dan melakukan *filtering* atas isian formulir pengukuhan PKP yang disampaikan melalui sistem *e-Registration*.

e. Apabila formulir permohonan dan dokumen yang disyaratkan tidak benar dan tidak lengkap, petugas pendaftaran memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat elektronik/*e-mail* (aplikasi *e-Registration*) agar Wajib Pajak dapat melengkapi. BPS adalah bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dari Wajib Pajak yang terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak telah diterima secara lengkap. BPS ini diterbitkan paling lambat satu hari kerja

setelah dokumen diterima oleh petugas pendaftaran.

Selanjutnya, berkas permohonan ditindaklanjuti dengan tata cara verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. Sesuai dengan tata cara ini, KPP melakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Setelah itu, verifikasi menghasilkan keluaran berupa Laporan Hasil Verifikasi (LHV). Nomor yang tercantum dalam LHV tersebut yang digunakan dalam langkah selanjutnya.

- f. Petugas pendaftaran menerima dan merekam nomor LHV.
Dalam kasus ini, jangka waktu penyelesaian proses permohonan pengukuhan PKP terlampaui sehingga permohonan pengukuhan PKP dianggap dikabulkan. Oleh karena itu, KPP harus menerbitkan SPPKP dengan tanggal pengukuhan adalah hari kerja kelima setelah tanggal BPS.
- g. Petugas pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP kepada Kepala Seksi Pelayanan.
- h. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP, kemudian menyerahkan kembali SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP kepada petugas pendaftaran.
- i. Petugas pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP kepada Wajib Pajak.
- j. Proses Selesai.
Tata cara ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja setelah BPS diterbitkan. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 mengubah jangka waktu ini menjadi paling lama sepuluh hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Permohonan dianggap diterima dan KPP harus segera menerbitkan SPPKP apabila jangka waktu penyelesaian permohonan telah terlampaui dan KPP tidak menerbitkan SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP. SPPKP harus

diterbitkan pada tanggal hari kerja kelima setelah permohonan diterima secara lengkap (penerbitan BPS).

Evaluasi Tata Cara Pelaporan Usaha Kena Pajak melalui Aplikasi *e-Registration*

Tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang ada di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu yang selanjutnya disebut sebagai tata cara yang terjadi di KPP seharusnya mengacu pada tata cara yang diatur dalam SOP. Namun, tata cara yang terjadi di KPP—dijelaskan oleh Bapak Sarif Robik—ternyata berbeda dengan tata cara yang diuraikan dalam SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut sebagai tata cara yang diuraikan dalam SOP. Ini artinya, ada perbedaan antara tata cara yang diatur dalam SOP dan tata cara yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013. Oleh karena itu, tata cara yang terjadi di KPP akan dievaluasi dengan dua indikator, yaitu tata cara yang diuraikan dalam SOP dan tata cara yang sesuai dengan peraturan.

Tata cara yang terjadi di KPP terdiri dari tahap registrasi, tahap pengiriman dokumen, dan tahap penyelesaian permohonan pelaporan usaha. Berikut adalah tiga tahap tata cara yang terjadi di KPP dan evaluasi tiap-tiap langkah dari ketiga tahap tersebut berdasarkan dua indikator evaluasi. Evaluasi yang pertama berdasarkan tata cara yang diuraikan dalam SOP, sedangkan evaluasi yang kedua berdasarkan tata cara yang sesuai dengan peraturan.

Ikhtisar evaluasi tata cara yang terjadi di KPP dengan tata cara yang diuraikan dalam SOP dan tata cara yang sesuai dengan peraturan disajikan dalam bentuk tabel. Ada dua langkah yang tidak diuraikan sama sekali dalam SOP, padahal langkah ini dilaksanakan di KPP dan diatur dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan. Selain itu, pelayanan penyelesaian permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP bisa jadi berbeda antar-KPP karena tidak ada SOP yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian

Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kerja Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kerja Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2013. Perbedaan tata cara ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena SOP adalah alat hukum yang seharusnya dijadikan acuan dalam pelayanan penyelesaian permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Padahal, tujuan utama penyusunan SOP adalah menyeragamkan atau menyamakan prosedur kerja pelayanan penyelesaian permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP yang ada di tiap-tiap KPP.

Tata cara yang diuraikan dalam SOP sama sekali tidak menyebutkan aplikasi *e-Registration*. Oleh karena itu, pegawai KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tidak lagi mengikuti setiap langkah yang diuraikan dalam SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan penyelesaian permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang dilakukan oleh pegawai KPP Pratama Jakarta Cakung Satu mengacu pada uraian tata cara yang diatur dalam lampiran X Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Selain tata cara penyelesaian permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, jangka waktu penyelesaian permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP juga berbeda. Jangka waktu yang digunakan oleh

KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah paling lama sepuluh hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. Namun, SOP mengatur bahwa jangka waktu penyelesaian permohonan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah satu hari kerja sejak permohonan diterima lengkap di KPP. Jangka waktu yang ada dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan sama dengan jangka waktu yang digunakan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, yaitu paling lama sepuluh hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

SIMPULAN

Tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu belum sesuai dengan tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration* yang diuraikan dalam SOP. Ketidaksesuaian uraian dalam naskah SOP dapat menyebabkan prosedur kerja yang dilaksanakan di tiap-tiap KPP berbeda karena belum ada SOP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang tata cara pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration*. Padahal, naskah

SOP disusun agar proses bisnis pengukuhan PKP dapat berjalan dengan baik dan seragam. Selain itu, naskah SOP ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam rangka pemberian layanan penyelesaian pelaporan usaha dan pengukuhan PKP melalui aplikasi *e-Registration*.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi ketiga belas. Diterjemahkan dari Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. *Accounting Information Systems*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi 2014*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sukardji, Untung. 2014. *Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2014*. Bekasi: Rajawali Press
- Wahyudi, Dudi. *Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-pertambahan-nilai/pengukuhan-pengusaha-kena-pajak-pkp.html> (diakses 5 Juni 2016 pukul 09.32)
- Kementerian Keuangan. *Pendaftaran NPWP Online e-Registration*. <http://www.kemenkeu.go.id/Layanan/pendaftaran-npwp-online-eregistration-0> (diakses 11 Juni 2016 pukul 11.58).